



---

## MODEL LAYANAN DAN KEBIJAKAN INKLUSIF BAGI DISABILITAS DALAM SISTEM SATGAS PPK PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Oleh

Hairani Siregar<sup>1</sup>, Narosu Siregar<sup>2</sup>, Meutia Nauliy<sup>3</sup>, Suri Mutia Siregar<sup>4</sup>, Muhammad Farhan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[hairani@usu.ac.id](mailto:hairani@usu.ac.id), <sup>2</sup>[narusu@usu.ac.id](mailto:narusu@usu.ac.id), <sup>3</sup>[meutia@usu.ac.id](mailto:meutia@usu.ac.id),

<sup>4</sup>[suri.mutia@usu.ac.id](mailto:suri.mutia@usu.ac.id), <sup>5</sup>[muhammadfarhan@usu.ac.id](mailto:muhammadfarhan@usu.ac.id)

---

### Article History:

Received: 16-05-2026

Revised: 11-06-2026

Accepted: 19-06-2026

### Keywords:

Inklusivitas, Disabilitas,  
Satgas PPK, Layanan  
Kampus, Kebijakan Publik

**Abstract:** Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model layanan dan kebijakan inklusif dalam sistem Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di Universitas Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dalam tiga tahap dengan melibatkan unsur multidisiplin, organisasi disabilitas, serta mitra nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat model layanan terintegrasi yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara komprehensif. Hambatan utama meliputi keterbatasan aksesibilitas sistem pelaporan, kurangnya SDM terlatih, serta belum tersedianya SOP khusus layanan disabilitas. Penelitian ini menghasilkan model kebijakan berbasis prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas universal, dan pendekatan berbasis korban. Model tersebut mencakup sistem pelaporan inklusif, mekanisme pendampingan terintegrasi, penguatan peran peer support, serta pembentukan unit layanan disabilitas dalam struktur Satgas PPK. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan tata kelola kampus inklusif serta menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain dalam membangun sistem layanan yang adil dan responsif terhadap kelompok rentan.

---

## PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting tidak hanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk lingkungan sosial yang adil dan aman. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi elemen krusial dalam menjaga integritas akademik dan kesejahteraan sivitas akademika.



Kebijakan nasional telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Kelompok ini sering kali menghadapi hambatan berlapis, baik dalam aspek fisik, komunikasi, maupun stigma sosial yang dapat menghambat akses terhadap layanan.

Konsep kampus inklusif menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik maupun sosial, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang layak. Inklusivitas dalam konteks ini tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup sistem layanan, kebijakan, serta budaya institusi yang responsif terhadap keberagaman.

Hasil analisis awal menunjukkan bahwa meskipun Universitas Sumatera Utara telah memiliki regulasi terkait Satgas PPK, belum terdapat model layanan yang secara spesifik dan sistematis mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik implementasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model layanan dan kebijakan inklusif berbasis pendekatan multidisiplin dan kolaboratif, serta mengintegrasikan praktik baik dari tingkat internasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain partisipatif yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai subjek aktif dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah *participatory qualitative approach*, yang memungkinkan penggalian data secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Pendekatan ini relevan dalam konteks perumusan kebijakan karena mampu menangkap pengalaman, persepsi, dan kebutuhan nyata dari berbagai kelompok.

Data dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang di dalamnya dilakukan diskusi kelompok terarah lintas sektor dan paparan praktik baik dari mitra nasional maupun internasional. FGD dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap eksploratif: identifikasi masalah dan kebutuhan.
2. Tahap formatif: perumusan kerangka kebijakan.
3. Tahap komparatif: benchmarking internasional.

Data penelitian yang didapat dianalisis menggunakan analisis tematik, yang meliputi pengkodean data, identifikasi tema, interpretasi pola, dan sintesis rekomendasi kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan tiga kali FGD dengan partisipan yang terdiri dari Satgas PPK perguruan tinggi, dosen lintas disiplin, mahasiswa, organisasi disabilitas, instansi pemerintah, serta mitra nasional dan internasional.

### 1. Analisis Hambatan Layanan Inklusif

Temuan menunjukkan bahwa hambatan layanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Secara lebih rinci, hambatan tersebut meliputi:

1. Hambatan struktural: belum adanya SOP khusus dan unit layanan disabilitas.



2. Hambatan teknis: sistem pelaporan yang belum aksesibel.
3. Hambatan SDM: keterbatasan tenaga dengan kompetensi inklusif.
4. Hambatan kultural: stigma dan kurangnya sensitivitas terhadap disabilitas

Selain itu, mekanisme pelaporan yang cenderung formal dan administratif menjadi hambatan psikologis bagi korban, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan pendekatan lebih adaptif.

## 2. Kebutuhan Sistem Layanan Inklusif

Kebutuhan yang teridentifikasi tidak hanya berkaitan dengan layanan, tetapi juga sistem pendukungnya. Beberapa kebutuhan utama antara lain:

1. Sistem pelaporan fleksibel dan aman.
2. Pendampingan berbasis kebutuhan individu.
3. Layanan yang tidak menimbulkan retraumatisasi.
4. Ketersediaan tenaga profesional.
5. Sistem rujukan yang terintegrasi

Kebutuhan ini menunjukkan bahwa layanan inklusif harus dirancang secara holistik, tidak parsial.

## 3. Model Layanan Inklusif yang Dikembangkan

Model layanan yang dihasilkan bersifat sistemik dan terdiri dari beberapa komponen utama:

- a. Sistem Pelaporan Inklusif  
Sistem pelaporan dirancang dengan prinsip aksesibilitas dan keamanan. Mekanisme pelaporan tidak lagi bersifat tunggal, tetapi menyediakan berbagai alternatif sesuai kebutuhan pengguna, termasuk bagi penyandang disabilitas sensorik maupun kognitif.
- b. Pendampingan Berbasis Korban  
Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan oleh tenaga yang sama untuk menjaga stabilitas emosional korban. Pendekatan ini bertujuan menghindari retraumatisasi akibat pengulangan cerita.
- c. Peer Support System  
Peer support berfungsi sebagai pintu masuk layanan yang lebih ramah dan mudah diakses. Peran ini sangat penting dalam menjembatani korban dengan layanan profesional.
- d. Sistem Rujukan Profesional  
Layanan dirancang terintegrasi dengan berbagai profesi, seperti psikolog, tenaga medis, dan bantuan hukum, sehingga korban mendapatkan layanan yang komprehensif.

## 4. Penguatan Kelembagaan

Model ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi keberlanjutan layanan. Pembentukan unit layanan disabilitas menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan inklusif tidak bersifat ad hoc, tetapi terinstitusionalisasi.

## DISKUSI

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif di perguruan tinggi masih menghadapi tantangan sistemik. Kesenjangan antara regulasi dan

implementasi mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan formal belum cukup tanpa didukung oleh sistem operasional yang jelas.

Pendekatan berbasis hak menjadi kunci dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak bersifat karitatif, tetapi menjamin kesetaraan akses. Selain itu, integrasi multidisiplin menjadi elemen penting dalam merespons kompleksitas kasus kekerasan.

Keberadaan peer support merupakan inovasi yang relevan dalam konteks kampus, karena mampu menjangkau korban secara lebih cepat dan informal. Namun, peran ini tetap harus didukung oleh sistem profesional yang kuat.

Benchmarking internasional menunjukkan bahwa keberhasilan layanan inklusif sangat bergantung pada komitmen kelembagaan, dukungan kebijakan, serta investasi dalam pengembangan SDM. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan menjadi agenda penting dalam implementasi model ini.



**Gambar 1 Kegiatan FGD**

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan layanan inklusif dalam sistem Satgas PPK merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan kampus yang aman dan adil. Model yang dihasilkan menawarkan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek kebijakan, layanan, dan kelembagaan.

## **SARAN**

1. Pengesahan kebijakan dalam bentuk regulasi formal.
2. Penguatan kapasitas SDM berbasis inklusivitas.
3. Pengembangan SOP teknis yang aplikatif.
4. Replikasi model di perguruan tinggi lain

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
- [2] Universitas Sumatera Utara. (2025). Peraturan Rektor USU Nomor 16 Tahun 2025.
- [3] World Health Organization. (2022). Violence prevention in educational settings.
- [4] United Nations. (2015). Sustainable Development Goals.